

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan global yang terjadi dewasa ini. Perubahan dan permasalahan tersebut seperti perkembangan masyarakat, informasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian, yang mana perubahan permasalahan tersebut berdampak pula terhadap perubahan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan yang digunakan oleh sekolah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan

Salah satu pokok masalah yang dihadapi bangsa ini untuk memasuki era globalisasi adalah kondisi sumber daya manusia (SDM) masih relatif rendah yang dicermati dari pemilikan latar pendidikannya. Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak, terlebih dalam suasana krisis multidimensi yang terjadi saat ini, masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas. Untuk itu pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini para pelaku pembangunan pendidikan berupaya untuk menaikkan derajat mutu pendidikan Indonesia agar dapat bersaing dalam

pasar tenaga kerja dengan menyesuaikan pembangunan pendidikan itu sendiri.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan tercipta apabila sebuah negara mengedepankan pendidikan di negara itu. Pendidikan yang diharapkan mampu mengubah sumber daya manusia menjadi berkualitas berupa pendidikan yang bermutu yang memiliki kaitan kedepan (*forward linkage*) dan kaitan belakang (*backward linkage*). Kaitan kedepan berupa syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern, dan sejahtera. Sejarah perkembangan bangsa mengajarkan bahwa bangsa yang maju, modern, makmur dan sejahtera adalah bangsa- bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Kaitan kebelakang berupa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermatabat.

Dalam rangka menjamin kualitas mutu pendidikan dan menyadari arti pentingnya pendidikan maka lahirlah Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan salah satunya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang didalamnya mencakup dasar dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan termasuk wajib belajar, penjamin kualitas pendidikan dan peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut dibuat untuk menghasilkan pendidikan Indonesia yang baik dan lulusan berkualitas disektor jenjang pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut terlebih dahulu menentukan standar yang harus menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan, maka untuk itu pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian dibentuk pula Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) sebagai badan yang menentukan 8 (delapan) standar dan kriteria pencapaian penyelenggaraan pendidikan

Adapun standar- standar yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tersebut yaitu : 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan, 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Salah satu perubahan mendasar dalam bidang Pendidikan Nasional dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah ini beserta penjabarannya dalam Permendiknas seharusnya dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pendidikan. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih banyak kalangan pendidikan yang belum atau tidak memahami Peraturan Pemerintah tersebut sehingga menghambat implementasinya di lapangan. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak menyentuh seluruh elemen pendidikan, atau kurang responnya kalangan pendidikan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut.

Standar Nasional Pendidikan diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya standar, dua orang guru tidak akan memberikan

penafsiran yang berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum. Demikian juga dengan proses pembelajaran, guru akan berfokus pada hasil (*output*) yang harus dicapai, tidak sekedar memenuhi target administratif yang ada dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Adanya standar atau hasil yang harus dicapai, juga dapat meningkatkan komponen input dan proses pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih efektif sehingga hasilnya lebih optimal karena pembelajaran lebih berfokus. Menurut Mulyasa (2008:19) dengan adanya Standar Nasional Pendidikan diharapkan terjadi berbagai perubahan dalam sistem dan layanan pendidikan yang mengarah pada kondisi sebagai berikut:

1. Meningkatkan prestasi peserta didik dengan menentukan secara jelas tentang apa yang harus diajarkan dan jenis performansi apa yang diharapkan.
2. Menyamakan peluang, baik secara nasional, regional, maupun lokal.
3. Menyediakan fungsi koordinasi yang dapat diamati
4. Menyediakan perlindungan pelanggan dengan menyuplai informasi yang akurat untuk peserta didik dan orang tua.
5. Memberikan peran penting untuk peserta didik, orang tua, guru-guru, dan tenaga kependidikan lainnya.

Menyadari pentingnya Standar Nasional Pendidikan maka setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia mengacu pada Standar tersebut. Karena Standar Nasional Pendidikan itu sendiri merupakan batas kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Penerapan Standar Nasional Pendidikan di sekolah- sekolah tentunya disadari oleh semua pihak. Akan tetapi banyak faktor yang membuat penerapan SNP tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Faktor penghambat ini dapat berasal dari dalam (*intern*) maupun dari luar (*ekstern*). Melalui kegiatan pra survey dapat diketahui bahwa faktor *intern* yang menjadi penghambat dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yaitu (1) peserta didik, (2) tenaga kependidikan, (3) daya dukung pimpinan, (4) sarana prasarana, (5) ketersediaan dana, dan (6) pemahaman warga sekolah terhadap keterlaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan faktor *ekstern* yang menjadi penghambat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yakni (1) letak geografis sekolah, (2) daya dukung masyarakat, (3) daya dukung masyarakat.

Upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung dapat dilihat dari kinerja sekolah untuk melengkapi dan upaya untuk memenuhi ke delapan standar dalam Standar Nasional Pendidikan tersebut. Kinerja sekolah berupa adanya Workshop yang diikuti oleh guru dalam upaya pelatihan pembuatan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), keaktifan guru dalam mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Semakin di lengkapinya fasilitas pembelajaran, Pendidik yang kompeten dibidangnya, serta hal lain yang mengacu kepada terpenuhinya delapan Standar Nasional Pendidikan.

Namun tidak semua Standar Nasional Pendidikan yang sedang diupayakan terpenuhi di SMA Negeri 13 Bandar Lampung dapat terealisasikan dengan baik. Salah satunya dapat dilihat dari standar pembiayaan yakni faktor

ketersediaan dana. Dana yang di dapat dari sekolah kadang tidak lancar sesuai dengan seharusnya. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan siswa yang membayar sumbangan tersebut. Sehingga menyebabkan anggaran pembiayaan berkurang sedangkan proses pembelajaran terus berjalan sehingga dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan tersebut. Masalah dana yang dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran juga datang dari bantuan pemerintah yang masih kurang maksimal sehingga menyebabkan kurangnya sarana prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran.

Sarana yang memadai juga merupakan hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan sarana prasana merupakan semua alat yang berguna bagi peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dan merupakan media perantara yang berguna untuk memudahkan peserta didik dalam pengambilan intisari materi pelajaran. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selain itu setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Tidak dapat kita pisahkan antara Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM) dengan sarana dan prasarana guna menyukseskan pendidikan di sekolah. Maka hal utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan perlengkapan sekolah adalah pengadaan sarana dan prasarana. Berikut adalah data sarana prasarana di SMA Negeri 13 Bandar Lampung

Tabel 1 Daftar Jumlah Sarana Prasarana di SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011

No	Sarana Prasarana	Kondisi Sekarang	Yang Diharapkan	Besar Tantangan
1	Ruang kelas baru	16 Ruang	18 Ruang	2 Ruang
2	Ruang praktik komputer	1 Ruang	1 Ruang	-
3	Ruang Laboratorium	2 Ruang	3 Ruang	1 Ruang
4	Ruang Laboratorium Bahasa	0 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
5	Kamar mandi/WC	11 Ruang	15 Ruang	4 Ruang
6	Sarana Pembelajaran	40 %	90 %	50 %
7	Sarana Olahraga	60 %	90%	30%
8	Ruang Tata Usaha	1 Ruang	1 Ruang	-
9	Ruang UKS	1 Ruang	1 Ruang	-
10	Ruang OSIS	1 Ruang	1 Ruang	-
11	Koperasi	0 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
12	Mushola	1 Ruang	1 Ruang	-
13	Perpustakaan	1 Ruang	1 Ruang	-
14	Lapangan Olahraga	0	1	1

Sumber: Profil SMA Negeri 13 Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat terdapat sarana prasarana yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan yang tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar. Karena semakin terpenuhinya sarana prasarana pendidikan maka akan sangat berpengaruh terhadap proses, hasil serta kualitas mutu pendidikan yang di cita- citakan.

Untuk terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak yang berkaitan dan berkepentingan dalam proses pendidikan. Selain dari pihak sekolah dari pihak peserta didik dan orang tua

pun harus mendukung pemenuhan kebutuhan ini demi terpenuhinya standar tersebut. Karena dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang tentunya berpengaruh terhadap output pendidikan yakni Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti memandang perlu untuk mengadakan penelitian yang berkenaan dengan faktor-faktor apa saja yang dominan menjadi penghambat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 13 Bandar Lampung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan delapan Standar Nasional Pendidikan berpengaruh terhadap mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Adanya faktor- faktor penghambat terhadap pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung.
3. Daya dukung dari *Stakeholder* mempengaruhi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
4. Terdapat beberapa Standar Nasional Pendidikan belum terpenuhi di SMA Negeri 13 Bandar Lampung

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah pada faktor-faktor penghambat pemenuhan kebutuhan Standar Nasional Pendidikan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/ 2011.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Faktor apa sajakah yang menghambat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/ 2011?”.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 13 bandar Lampung.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya dalam hal pengambilan kebijakan yakni pemenuhan hak dan kewajiban warganegara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

b. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan secara praktis dalam penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Tenaga Kependidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pengetahuan bagi tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang di cita- citakan.

2. Sekolah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan suplemen atau media sebagai tambahan literatur bagi Sekolah Menengah Atas khususnya SMA Negeri 13 Bandar Lampung.

3. Peneliti

Menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya ilmu pendidikan yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah Faktor- Faktor Penghambat Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

1.6.2 Ruang Lingkup Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Bandar Lampung.

1.6.3 Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Bandar Lampung.

1.6.4 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung dari tanggal 15 November 2010-27 Mei 2011.

1.6.5 Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan , dengan wilayah kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), karena bertujuan untuk membentuk warga Negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan maksimal jika pemberian layanan pendidikan kepada peserta didik memenuhi standar.